

## **Kebijakan Presiden Prabowo Subianto Pada Bencana Ekologis Di Aceh, Sumatera Utara Dan Padang Dalam Perspektif Nilai-Nilai Politik Islam**

**Afif Musthofa Kawwami, Juwita Sylvana Agustin**

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

[afif.musthofa.kawwami\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:afif.musthofa.kawwami_uin@radenfatah.ac.id)

### **Abstrak**

Artikel ini menganalisis proses pengambilan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi bencana ekologis banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Padang (Sumatera Barat) pada akhir 2025 dari perspektif nilai-nilai politik Islam. Dengan menggunakan kerangka Maqasid al-Shariah dan prinsip etika Islam seperti keadilan (adl), kepedulian sosial (masalah), amanah (tanggung jawab moral), syura (konsultasi), serta perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah), artikel ini mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut tampak dalam proses kebijakan publik yang diambil pemerintah Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan darurat mencerminkan beberapa nilai politik Islam secara implisit, seperti prioritas kesejahteraan masyarakat, tanggung jawab moral pemimpin, serta kesadaran ekologis terkait faktor penyebab bencana. Namun, terdapat juga tantangan dalam implementasinya, termasuk kritik publik mengenai sensitivitas sosial dan penetapan status bencana nasional. Artikel ini memberikan wawasan tentang hubungan antara nilai moral Islam dan praktik kebijakan negara dalam konteks krisis ekologis yang kompleks.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Bencana Ekologis, Nilai-nilai Politik Islam

### **Abstract**

This article analyzes President Prabowo Subianto's policy-making process in response to the ecological disasters of floods and landslides in North Sumatra, Aceh, and Padang (West Sumatra) in late 2025 from the perspective of Islamic political values. Using the Maqasid al-Shari'ah framework and Islamic ethical principles such as justice (adl), social concern (masalah), amanah (moral responsibility), shura (consultation), and environmental protection (hifz al-bi'ah), this article examines how these values are manifested in the Indonesian government's public policy process. Findings indicate that emergency policies implicitly reflect several Islamic political values, such as prioritizing public welfare, the moral responsibility of leaders, and ecological awareness regarding disaster-causing factors. However, there are also challenges in their implementation, including public criticism regarding social sensitivity and the declaration of a national disaster status. This article provides insight into the relationship between Islamic moral values and state policy practices in the context of a complex ecological crisis.

**Keywords:** Policy, Ecological Disaster, Islamic Political Values

## A. PENDAHULUAN

Bencana ekologis berupa banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 merupakan salah satu krisis alam terbesar dalam sejarah kontemporer Indonesia, dengan ribuan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan populasi yang mengungsi akibat dampak banjir yang parah. Bencana ini dipicu oleh cuaca ekstrem yang diperparah oleh degradasi lingkungan akibat deforestasi dan pengerukan lahan yang tidak terkontrol. Kerusakan ekologis ini meningkatkan intensitas banjir serta memperluas dampak bencana di daerah hulu aliran sungai.<sup>1</sup>

Selain itu, pakar lingkungan dan media melaporkan bahwa kerusakan hutan dan aktivitas manusia seperti deforestasi dan praktik pembukaan lahan secara besar-besar telah memperparah dampak banjir. Pemerintah bahkan memanggil perusahaan yang diduga melakukan penebangan hutan secara ilegal untuk menjelaskan aktivitasnya.<sup>2</sup>

Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan mengambil sejumlah kebijakan darurat untuk mengatasi krisis ini. Langkah kebijakan tersebut melibatkan mobilisasi seluruh sumber daya nasional, percepatan bantuan logistik, restorasi infrastruktur publik, dan pernyataan bahwa negara akan menangani situasi ini secara menyeluruh. Namun, dalam masyarakat mayoritas Muslim seperti Indonesia, kebijakan publik tidak hanya dilihat dari aspek teknis administratif tetapi juga dinilai dari keterkaitan moral dan etika yang bersumber dari ajaran Islam. Artikel ini bertujuan untuk melihat apakah dan bagaimana nilai-nilai politik Islam hadir dan tercermin dalam proses pengambilan kebijakan tersebut.<sup>3</sup>

Dalam kajian politik Islam, nilai moral dan etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah menjadi landasan utama untuk menilai tindakan individu maupun kebijakan negara. Salah satu kerangka yang banyak digunakan adalah Maqasid al-Shariah (tujuan syariah), yang menekankan tujuan hukum Islam, yakni melindungi agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta (*al-daruriyyat al-khams*). Nilai-nilai ini memberikan landasan normatif bahwa tujuan hukum Islam adalah menciptakan kesejahteraan umum (*maslahah*) dan menghindarkan kerugian (*mafsadah*) bagi masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> *Asia flood death toll surpasses 1,500 as calls grow to fight deforestation*. WRAL/AP.

<sup>2</sup> *Did deforestation worsen Sumatra disaster? Indonesia to trace timber ....* Channel News Asia.

<sup>3</sup> *President Prabowo Orders National-Level Response to Sumatra Disaster*. INP.polri.go.id.

<sup>4</sup> Ashfaq Ahmed & Shakir Hussain, *Maqasid al-Shariah and Its Influence on Islamic Governance and Policy*. Journal of Religion & Society, 2025

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai proses pengambilan kebijakan dalam perspektif nilai-nilai politik Islam telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam diskursus fiqh siyasah, maqasid al-shariah, dan kebijakan publik Islam kontemporer. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memetakan posisi penelitian ini di antara kajian-kajian terdahulu, sekaligus menunjukkan celah akademik yang hendak diisi.

### 1. Politik Islam dan Kebijakan Publik

Kajian klasik tentang politik Islam menempatkan negara dan kepemimpinan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum (masalah ‘ammah). Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan terletak pada kemampuan pemimpin menjaga agama dan mengatur urusan dunia secara adil<sup>5</sup>. Perspektif ini kemudian berkembang dalam kajian kontemporer yang menekankan bahwa kebijakan publik dalam Islam tidak harus berbentuk hukum syariah formal, melainkan dapat hadir dalam bentuk nilai etis dan moral yang membimbing pengambilan keputusan negara.<sup>6</sup>

Mohammad Hashim Kamali menekankan bahwa nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik harus dibaca melalui tujuan hukum Islam (*maqasid al-shariah*), bukan sekadar melalui simbolisasi hukum<sup>7</sup>. Dengan pendekatan ini, kebijakan negara dapat dinilai Islami sejauh memenuhi tujuan perlindungan jiwa, harta, dan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini relevan dengan konteks Indonesia yang bukan negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya Muslim dan memiliki sensitivitas moral terhadap nilai-nilai Islam dalam kebijakan negara.

### 2. Maqasid al-Shariah sebagai Kerangka Analisis Kebijakan

Pendekatan *maqasid al-shariah* telah banyak digunakan dalam kajian kebijakan publik modern. Ahmed dan Hussain menyatakan bahwa *maqasid* menyediakan jembatan konseptual antara nilai normatif Islam dan praktik pemerintahan modern<sup>8</sup>. Dalam konteks kebencanaan, tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) menjadi prioritas utama kebijakan publik.

Penelitian Asmuni tentang politik Islam berbasis maqasid menunjukkan bahwa kebijakan yang

---

<sup>5</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1996.

<sup>6</sup> Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Islamic Texts Society, 2003.

<sup>7</sup> Kamali, Mohammad Hashim, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, Islamic Texts Society, 2008.

<sup>8</sup> Ahmed, Ashfaq & Hussain, Shakir, "Maqasid al-Shariah and Its Influence on Islamic Governance and Policy," *Journal of Religion & Society*, 2025.

responsif terhadap krisis sosial dan kemanusiaan merupakan manifestasi nyata dari nilai Islam, meskipun tidak dilabeli secara formal sebagai “kebijakan Islam”<sup>9</sup>. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa respons negara terhadap bencana ekologis dapat dianalisis secara sah dalam perspektif politik Islam.

### 3. Nilai Amanah, Keadilan, dan Kepemimpinan dalam Islam

Konsep amanah dan keadilan (‘adl) merupakan tema sentral dalam literatur kepemimpinan Islam. An-Nawawi dalam *Riyadh al-Shalihin* menegaskan bahwa pemimpin adalah pihak yang paling besar tanggung jawabnya di hadapan Allah atas kesejahteraan rakyatnya<sup>10</sup>. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam kajian tata kelola pemerintahan Islam (Islamic governance) yang menekankan akuntabilitas moral pemimpin, terutama dalam kondisi darurat seperti bencana alam.

Studi Munaddhomah Journal tentang *good governance* dalam perspektif Islam menegaskan bahwa kepemimpinan yang amanah ditandai oleh kehadiran negara dalam situasi krisis, kecepatan pengambilan keputusan, serta keberpihakan kepada kelompok rentan<sup>11</sup>. Hal ini menjadi parameter penting dalam menilai kebijakan Presiden Prabowo pada bencana ekologis di Sumatera.

### 4. Islam dan Etika Lingkungan (Fiqh al-Bi’ah)

Dalam kajian Islam kontemporer, isu lingkungan hidup semakin mendapat perhatian melalui konsep fiqh al-bi’ah (fikih lingkungan). Islam memandang manusia sebagai khalifah fi al-ardh yang memiliki kewajiban menjaga keseimbangan alam. Kerusakan lingkungan dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah Tuhan<sup>12</sup>.

Penelitian tentang etika lingkungan Islam menunjukkan bahwa bencana ekologis tidak dapat dilepaskan dari kegagalan manusia dan negara dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan<sup>13</sup>. Oleh karena itu, kebijakan negara pasca-bencana tidak hanya dinilai dari kecepatan respons darurat, tetapi juga dari keseriusan dalam memperbaiki tata kelola lingkungan jangka panjang.

## C. METODE PENELITIAN

Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder berupa pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto,

---

<sup>9</sup> Asmuni, A., “Politik Islam Perspektif Maqasid Syariah,” *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 2023.

<sup>10</sup> An-Nawawi, *Riyadh al-Shalihin*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1999.

<sup>11</sup> “Good Governance According to Islamic Perspective,” *Munaddhomah Journal*, 2024.

<sup>12</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Ri’ayat al-Bi’ah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah*, Dar al-Syuruq, Kairo, 2001.

<sup>13</sup> “Islamic Environmental Ethics and Public Policy,” *Journal of Islamic Studies*, 2022.

dokumen kebijakan pemerintah, laporan media nasional dan internasional, serta literatur akademik yang membahas politik Islam, *maqasid al-shariah*, kebijakan publik, dan etika lingkungan Islam. Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif-analitis, yaitu menafsirkan proses pengambilan kebijakan dalam penanganan bencana ekologis di Sumatera Utara, Aceh, dan Padang melalui kerangka nilai-nilai politik Islam seperti *maslahah*, *amanah*, *syura*, dan *hifz al-bi'ah*. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-interpretatif untuk menghubungkan fakta kebijakan empiris dengan prinsip normatif Islam, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai relasi antara nilai moral Islam dan praktik kebijakan publik dalam konteks krisis ekologis kontemporer.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Prioritas Nasionalitas dan Mobilisasi Sumber Daya**

Salah satu tindakan awal Presiden Prabowo adalah memerintahkan penanganan bencana sebagai prioritas nasional melalui mobilisasi seluruh sumber daya nasional—baik dari kementerian, lembaga, TNI, Polri, maupun perangkat pemerintah daerah—untuk mempercepat evakuasi, distribusi bantuan, dan restorasi layanan publik di daerah terdampak.<sup>14</sup>

Dalam perspektif nilai politik Islam, keputusan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip *maslahah* (kesejahteraan umum). Islam menekankan pentingnya pemimpin mengutamakan kepentingan rakyat dan memastikan keselamatan jiwa serta pemenuhan kebutuhan dasar mereka dalam situasi darurat. Dalam situasi bencana, prioritas dalam penggunaan sumber daya untuk membantu masyarakat selamat dan pulih sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa).<sup>15</sup>

##### **Amanah Kepemimpinan: Tanggung Jawab Moral Presiden**

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa bantuan dan respons akan terus diberikan sehingga korban tidak “menanggung beban sendiri” dalam kondisi krisis. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, tetapi menunjukkan tanggung jawab moral terhadap rakyat yang tengah menderita akibat bencana alam.

Dalam Islam, nilai *amanah* mencerminkan tanggung jawab pemimpin atas keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Pemimpin yang amanah adalah mereka yang memikul tugasnya dengan sungguh-sungguh dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, terutama dalam kondisi kritis. Nilai ini menegaskan bahwa pemimpin tidak hanya menjalankan fungsi

---

<sup>14</sup> *President Prabowo Orders National-Level Response to Sumatra Disaster*. INP.polri.go.id.

<sup>15</sup> Ashfaq Ahmed & Shakir Hussain, *Maqasid al-Shariah and Its Influence on Islamic Governance and Policy*. Journal of Religion & Society, 2025.

administratif tetapi juga moral dalam mendukung kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari amanah mereka di hadapan Allah SWT.<sup>16</sup>

### **Syura dan Koordinasi Kebijakan**

Seiring dengan mobilisasi bantuan, pemerintah pusat melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah serta lintas lembaga negara untuk memastikan kebijakan dan respons dilakukan secara terkoordinasi dan efektif. Ini termasuk dialog dengan otoritas lokal di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta pengaturan logistik melalui jalur udara untuk area yang tak dapat diakses lewat darat.<sup>17</sup>

Konsep syura dalam Islam menekankan pentingnya konsultasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam mengambil keputusan bersama—termasuk dalam kebijakan publik. Partisipasi berbagai institusi dan aktor menunjukkan upaya untuk menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.<sup>18</sup>

### **Perlindungan Lingkungan dan Kewajiban Khalifah**

Salah satu isu yang mengemuka dalam diskursus publik adalah identifikasi penyebab bencana yang terkait dengan degradasi lingkungan, seperti penebangan hutan, kegiatan pertambangan, dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Pemerintah kemudian memulai investigasi terhadap perusahaan yang terlibat dalam pembukaan hutan, serta menekankan pentingnya perlindungan lingkungan untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa depan.<sup>19</sup>

Dalam nilai politik Islam, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Perlindungan lingkungan bukan hanya aspek teknis, tetapi merupakan tugas moral untuk mewujudkan keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Kebijakan yang menempatkan aspek perlindungan lingkungan dalam agenda penyelesaian bencana mencerminkan kesadaran terhadap nilai ini, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan politik.

### **Pengelolaan Anggaran dan Dukungan Ekonomi**

Sebagai bagian dari respons kebijakan, Presiden Prabowo juga menyetujui alokasi dana darurat dalam jumlah signifikan ke setiap kabupaten atau kota terdampak guna memastikan respon

---

<sup>16</sup> Good Governance According to Islamic Perspective. Journal Munaddhomah. [Jurnal Pascasarjana](#)

<sup>17</sup> *Prabowo orders full nationwide effort for Sumatra disaster response*. ANTARA.

<sup>18</sup> *Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam*. Unida Artikel.

<sup>19</sup> *Sumatra floods: Prabowo ensures aid reaches inaccessible areas by air*. ANTARA.

kemanusiaan dapat terus berlangsung meskipun anggaran daerah hampir habis. Keputusan ini dipandang sebagai upaya pemerintah membantu pemerintah lokal memenuhi kebutuhan darurat seperti makanan, bahan bakar, dan kebutuhan dasar lainnya.<sup>20</sup>

Nilai Islam yang menekankan kesejahteraan umum (masalah) dan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak dapat dilihat dalam keputusan ini, karena kebijakan tersebut membantu memperlancar akses bantuan serta meringankan beban ekonomi para korban. Pendekatan ini juga mengurangi ketimpangan akses bantuan di tingkat lokal, yang sesuai dengan prinsip keadilan.

### **Tantangan dan Kritik Publik**

#### **Penetapan Status Bencana Nasional**

Masyarakat sipil serta sejumlah organisasi meminta pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi secara penuh. Pemerintah sempat menyatakan masih memantau situasi sebelum menentukan status tersebut, yang memicu perdebatan publik tentang respons pemerintah terhadap krisis ini.

Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan dan masalah umum memerlukan respons yang adil dan cepat dalam situasi darurat, sehingga penetapan status bencana nasional dapat dilihat sebagai instrumen untuk memastikan akses bantuan yang lebih luas dan tidak diskriminatif. Kritik ini menunjukkan bahwa sebagian publik merasa kebijakan belum sepenuhnya memuaskan harapan moral masyarakat.

#### **Sensitivitas Sosial dan Empati**

Selain itu, kritik terkait sensitivitas sosial pejabat atau staf negara dalam menghadapi korban bencana juga menjadi sorotan publik. Hal semacam ini menunjukkan bahwa kebijakan publik bukan hanya masalah administratif tetapi juga terkait ekspresi empati dan rasa kemanusiaan yang dalam. Nilai sosial seperti empati, yang terkait dengan ajaran Islam tentang kepedulian sosial kepada sesama, menjadi bagian penting dalam menilai respons pemerintah secara menyeluruh.

### **E. KESIMPULAN**

Analisis terhadap proses pengambilan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Padang menunjukkan bahwa respons pemerintah mencerminkan sejumlah nilai politik Islam secara implisit. Nilai-nilai seperti masalah umum, amanah kepemimpinan, syura koordinatif, serta perlindungan lingkungan terlihat dalam keputusan strategis pemerintah meskipun tidak diformalkan sebagai kebijakan berbasis agama.

---

<sup>20</sup> *Prabowo allocates US\$240,000 to each disaster-hit district ....* Heidoh.

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait penetapan status bencana nasional dan ekspektasi publik terhadap respons yang lebih cepat dan komprehensif, serta aspek sensitivitas sosial dan empati dalam praktik kebijakan. Relasi antara nilai Islam dan kebijakan negara dalam konteks krisis ekologis memperlihatkan pentingnya landasan moral yang kuat untuk arah kebijakan publik yang adil, responsif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Ashfaq & Hussain, Shakir, "Maqasid al-Shariah and Its Influence on Islamic Governance and Policy," *Journal of Religion & Society*, 2025.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1996.
- An-Nawawi, *Riyadh al-Shalihin*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1999.
- Ashfaq Ahmed & Shakir Hussain, *Maqasid al-Shariah and Its Influence on Islamic Governance and Policy*. *Journal of Religion & Society*, 2025.
- Asia flood death toll surpasses 1,500 as calls grow to fight deforestation*. WRAL/AP.
- Asmuni, A., "Politik Islam Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 2023.
- Did deforestation worsen Sumatra disaster? Indonesia to trace timber ....* Channel News Asia.
- Good Governance According to Islamic Perspective, *Munaddhomah Journal*, 2024.
- Islamic Environmental Ethics and Public Policy, *Journal of Islamic Studies*, 2022.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, Islamic Texts Society, 2008.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Islamic Texts Society, 2003.
- Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam*. Unida Artikel.
- Masyarakat Sipil Desak Presiden Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera*. Kompas.
- President Prabowo Orders National-Level Response to Sumatra Disaster*. INP.polri.go.id.
- President Prabowo Orders Power Restoration Across Aceh, North Sumatra, and West Sumatra*. INP.polri.go.id.
- Prabowo orders full nationwide effort for Sumatra disaster response*. ANTARA.
- Sumatra floods: Prabowo ensures aid reaches inaccessible areas by air*. ANTARA.
- Universalitas nilai-nilai syariah dalam perspektif kebijakan publik*. ANTARA News Aceh.
- Yusuf al-Qaradawi, *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Dar al-Syuruq, Kairo, 2001.